

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kawasan yang mengalami kejahatan transnasional adalah Asia Tenggara yang sudah lama menjadi basis terorisme untuk merekrut anggota untuk menjadi simpatisan teroris untuk di bawa ke Irak dan Suriah. Kelompok radikal tersebut tidak hanya menarik anggota tetapi juga untuk mengatur serangan yang akan dilancarkan di kawasan Asia Tenggara sendiri seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina. Salah satu negara yang mengalami konflik terorisme terpanjang adalah Filipina. Filipina merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km dan memiliki 7.000 pulau. Filipina merupakan negara yang memiliki luas daratan sebesar 30.000 km persegi dan jalur masuk Filipina sendiri hanya melalui jalur laut. Filipina termasuk negara kepulauan terbesar dan isu keamanan menjadi masalah serius bagi negara tersebut. Pengawasan wilayah perbatasan yang didominasi oleh laut membuat pemerintah Filipina harus bekerja maksimal untuk menanggulangi terorisme. (LARASATI, 2015)

Mayoritas masyarakat Filipina beragama Katolik tetapi di bagian selatan Filipina bermayoritas muslim. Bagian selatan Filipina dihuni oleh bangsa Moro yang ingin melepas diri dari pemerintahan Filipina dan hal ini terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Di tahun 70-an kelompok pemberontak ini bernama Moro Islamic Liberation Front (MNLF) dan pada tahun 80-an didominasi oleh Moro Islamic Liberation Dront atau MILF yang merupakan pecahan dari kelompok MNLF. MILF merupakan kelompok yang lebih radikal dari sebelumnya ditambah lagi dengan kemunculan Abu Sayyaf Group dan Kelompok Maute atau sebelum dikenal dengan Khilafah Islamiyah Mindanao (KIM) di tahun 90-an yang membuat masalah terorisme di Filipina menjadi lebih rumit. Pemerintah Filipina membagi mereka menjadi dua kelompok yaitu MNLF dan MILF termasuk kelompok internal armed conflict sedangkan kelompok Abu Sayyaf Group (ASG) menjadi kelompok teroris. (Permono, 2013)

Kelompok bangsa Moro di Mindanao selatan melawan pemerintahan Filipina dikarenakan ingin memisahkan diri dan membentuk negara Islam otonom sendiri dan disebut kelompok separatis. Kelompok Abu Sayyaf dan Jemaah Islamiyah termasuk kedalam kelompok militan radikal karena mereka langsung terafiliasi oleh ISIS dan ingin membangun khalifahan Islam di daerah Filipina selatan untuk ISIS. Kelompok Abu Sayyaf dan Kelompok

Militan lainnya muncul dikarenakan menjadi korban diskriminasi pemerintah Filipina di masa

lalu. Kelompok-kelompok terorisme tersebut telah meresahkan masyarakat Filipina dan pemerintah Filipina dikarenakan aksi teror yang telah mereka lakukan. Filipina telah mengalami banyak sekali kerugian dalam peristiwa-peristiwa yang telah mereka lakukan seperti ekonomi, korban jiwa serta psikologis masyarakat Filipina. (Banlaoi, 2012)

Munculnya kelompok-kelompok militan radikal seperti Abu Sayyaf Group, Jamaah Islamiyah dan kelompok maute membuat pemerintah Filipina beranggapan bahwa pengaruh ISIS sudah memasuki Filipina. Hal yang ditakutkan oleh pemerintah Filipina adalah ideologi ISIS yang akan mempengaruhi kelompok separatis dan mengancam keamanan Filipina serta wilayah Asia Tenggara lainnya. ISIS juga telah merilis video himbauan untuk membangun basis pelatihan di daerah Filipina Selatan hal ini untuk memberi tahu orang yang mendukung atau bergabung ISIS yang tidak bisa menuju Suriah dikarenakan masalah biaya dan keamanan. Pemerintah Filipina di buat resah akan video tersebut dikarenakan mereka sudah dihadapi oleh kelompok separatis ditambah dengan adanya kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS. Sebenarnya tidak Filipina saja yang resah akan tersebut tetapi negara-negara yang berbatasan di bagian Filipina Selatan juga akan terkena imbasnya. (Apriani, 2018)

Di kawasan Asia Tenggara, Filipina merupakan kawasan yang memiliki jumlah insiden terorisme paling banyak dari tahun 1969 sampai 2009 mengalami 600 insiden tindakan terorisme. Namun di tahun berikutnya mengalami kenaikan insiden yang dilakukan teroris seperti pada tahun 2010 terjadi 205 insiden terorisme lalu 2011 sebanyak 149 insiden dan jumlah tersebut terus bertambah hingga 2012 terjadi 247 insiden, 2013 menjadi 651 insiden, 2014 terjadi 597 insiden kemudian insiden tertinggi terjadi di tahun 2015 yaitu sebanyak 717 insiden dan di tahun 2016 turun menjadi 633 insiden terorisme (Wardani, 2018). Menurut Human Right Watch bahwa jumlah korban yang diakibatkan oleh kelompok radikal tersebut sebanyak 1.700 orang dari tahun 2000 sampai 2007 di Filipina. Dari banyaknya insiden dan korban dari gerakan radikal tersebut dapat kita lihat di berapa peristiwa yang terjadi di Filipina seperti peledakan di General Santos City di tahun 2000 yang menewaskan 14 orang dan 50 warga lainnya mengalami luka-luka, ledakan tersebut terjadi di beberapa titik di kota General Santos yang berada di Filipina Selatan. Awalnya ledakan itu terjadi di pusat perbelanjaan yang berasal dari dalam mobil terparkir di daerah tersebut lalu disusul dua ledakan bom lainnya di stasiun radio milik jaringan Mindanao Network (RMN) dan dua bom lainnya ditemukan di dekat pusat perbelanjaan namun berhasil dijinakan oleh polisi. Korban yang tewas dari peledakan tersebut merupakan pengemudi angkutan umum dan pedagang kaki lima yang berada di dekat pusat perbelanjaan. (Liputan6, 2002)

Ledakan juga terjadi di Zamboanga city pada tahun 2001 yang menewaskan 4 orang dan 50 orang di bawa kerumah sakit akibat peristiwa tersebut. Pada peristiwa ini terjadi dua ledakan besar yang pertama dilaporkan meledak di swalayan Shop O'rama yang saat itu di padati pembeli lalu disusul ledakan kedua di toko Shopper's Central yang berada dekat di lokasi ledakan bom pertama terjadi. Kota Zamboanga memang sering terjadi sasaran pengeboman seperti yang terjadi pada September lalu bahwa sebuah ledakan berdaya besar terjadi di markas militer dengan korban seorang tentara Amerika Serikat tewas dan 22 warga setempat mengalami cedera atas peristiwa tersebut (liputan6, 2002). Pada tahun 2004 juga terjadi pengeboman di kapal SuperFerry yang mengakibatkan 116 orang tewas atas peristiwa tersebut dan membuat kapal tersebut tenggelam. Kapal tersebut berlayar menuju Cagayan de Oro City lalu mengalami ledakan setelah 90 menit berlayar dari Pelabuhan Manila. Ledakan tersebut diyakini sebagai kecelakaan namun menurut penyelidikan bahwa penyebab ledakan tersebut adalah bom TNT seberat 4 kg (Koran Sindo, 2019). Ledakan juga terjadi di luar HotelMarco Polo di Davao City pada tahun 2016 yang menewaskan 12 orang dan 60 orang mengalami cedera dari peristiwa tersebut. Saat ledakan terjadi saat itu presiden Filipina, Rodrigo Duterte tengah berada di kota tersebut namun presiden tidak mengalami cidera. Bomyang digunakan saat itu merupakan bom rakitan yang berbahan mortir menurut juru bicara kepresidenan. (BBC News Indonesia, 2016)

Pada tahun 2020 juga terjadi ledakan di Jolo, provinsi Sulu, Filipina yang disebut dengan ledakan kembar yang menewaskan 14 orang dan 75 orang mengalami luka-luka atas peristiwa tersebut. Ledakan pertama dipicu sebuah bom yang berada pada sebuah sepeda motor dan menurut penyelidikan bahwa ledakan tersebut dilakukan pengebom bunuh diri dan begitu juga dengan ledakan kedua yang dilakukan oleh pengebom bunuh diri (Christiastuti, 2020). Dari beberapa kejadian tersebut bahwa kelompok Abu Sayyaf Group bertanggung jawab dan diduga kuat atas insiden yang terjadi. Kelompok ini memiliki modus yang mirip seperti kelompok Islamic State dan kelompok ini sendiri menguasai sejumlah pulau di paling selatan Filipina dengan melakukan pembunuhan dengan pemenggalan atau penggorokan. Kelompok ini melakukan penculikan warga asing dengan pemerasan atau tebusan dan dilakukan pemenggalan jika habis tenggat waktu permintaan uang tebusan habis. Penculikan yang dilakukan kelompok ini untuk kepentingan ekonomi dengan wadah untuk keuntungan materiil. ASG sendiri pernah membebaskan seorang warga Norwegia dan Filipina dengan tebusan sebanyak 360.000 Dollar Amerika untuk dua nyawa tersebut. (Nanyang Technological University, 2016)

Salah satu insiden yang menimbulkan banyak korban jiwa adalah konflik marawi dikarenakan kelompok-kelompok jihadis sudah mahir dalam melakukan operasi desentralisasi yang didapatkan dari meniru pasukan militer konvensional. Kota marawi dikuasai oleh kelompok militan karena otoritas pemerintah Filipina tidak terlalu memperhatikan dari segi keamanan untuk wilayah ini. Kelompok militan ini merebutkan kota Marawi dengan mudah dan memanfaatkan kota marawi sebagai basis kekuatan di Asia Tenggara. Korban yang ditimbulkan dari konflik ini sebanyak 336 militan tewas dengan 11 warga asing termasuk, 9 militan tertangkap, 84 tentara pemerintah tewas, 500 tentara pemerintah terluka dan 125 warga sipil tewas atas insiden tersebut. (Wardani, 2018)

Beberapa peristiwa diatas menjelaskan bahwa konflik terorisme begitu menyusahkan pemerintah Filipina dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh terorisme tersebut. Kelompok terorisme di Filipina telah menimbulkan banyak sekali korban jiwa dan juga telah menghancurkan banyak Fasilitas publik. Banyaknya kelompok radikal di Filipina Selatan dan konflik yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun menggambarkan bahwa kelompok tersebut sangat berbahaya. Oleh karena itu negara-negara harus berusaha meningkatkan keamanannya untuk menjaga masyarakatnya dikarenakan kerugian yang ditimbulkan oleh terorisme tidaklah sedikit.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana strategi Duterte mengatasi terorisme di Filipina?

## **C. Kerangka Berpikir**

### **Konsep Terorisme**

Secara etimologi kata teroris berawal dari kata terror yang memiliki arti kata takut. Pengertian terorisme lebih menuju kepada taktik atau alat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Istilah terorisme sendiri masih tergolong baru untuk di Indonesia sendiri. Kata teror muncul sekitar tahun 1789 dengan istilah *system, regime de terreur* di dalam *The Dictionnaire of The Academic Francaise*. Istilah teror ini melekat ketika meledaknya revolusi Prancis namun waktu itu terorisme masih memiliki konotasi positif yang dimana kata ini digunakan untuk menggulingkan penguasa mereka dan berhasil dilakukan. Jauh sebelum revolusi Prancis juga pernah dilakukan aksi teror yaitu kelompok ekstrem Yahudi yang membunuh bangsa Romawi di wilayah Sengketa Israel dan Palestina sekarang dan sekarang aksi terorisme sering digunakan di berbagai dunia yang melibatkan antar agama maupun etnis. (Asfar, 2003)

Kata terorisme merupakan salah satu konsep di dalam ilmu sosial yang menjadi kontroversi dan perdebatan. Maka dari itu kata terorisme sendiri bisa didefinisikan oleh orang-orang untuk berbagai kepentingan seperti kepentingan ideologi maupun politik. Laquer (Walter Laqueur, 1987) berpendapat bahwa definisi terorisme yang sebenarnya tidak ada atau tidak akan muncul dimasa mendatang padahal pendefinisian itu penting untuk untuk akademik, praktis untuk mengatasi terorisme sendiri. Namun memerangi terorisme harus memiliki kejelasan apakah mereka teroris atau tidak dan kejelasan tersebut harus berasal dari definisi yang jelas tadi karena mereka bergerak secara terorganisir dan bisa menimbulkan dampak kontra produktif jika terjadi kesalahan. Jadi istilah terorisme sendiri harus dipahami dengan hati-hati bukan sebagai alat propaganda karena jika orang benar-benar mengerti istilah terorisme maka merancang hukuman untuk Tindakan teror akan mudah dan tepat.

Para penguasa mendefinisikan terorisme lebih ekstrem hal tersebut disebabkan karena para penguasa merupakan salah satu korban dalam aksi terorisme dan mereka juga memiliki tugas dalam mengatasi hal ini. Definisi terorisme dan kriminal pertama kali dibedakan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1974 yang dimana definisi tersebut yaitu terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan politik, dan termasuk penggunaan kekerasan untuk menjadikan masyarakat dalam ketakutan. CIA juga mendefinisikan terorisme sebagai ancaman atau penggunaan kekerasan dengan tujuan politik yang dilakukan oleh kelompok atau individu dengan melawan pemerintah yang sah dan menakuti masyarakat secara lebih luas. (Mubarak, 2012)

Wardlaw (Grand Wardlaw, 1989) mendefinisikan terorisme secara netral yaitu terorisme politik adalah penggunaan kekerasan oleh suatu kelompok atau individu yang bergerak diatas nama pemerintah atau melawan pemerintah dengan Tindakan yang dibuat untuk menciptakan ketakutan yang lebih luas dengan tujuan menekan kelompok yang menjadi sasaran mereka untuk memenuhi tuntutan mereka sendiri.

### **Konsep Kontra Terorisme**

Kontra terorisme menurut Hoffman dan Morrison Taw (Georgsen, 2007) adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh pemerintah untuk melawan terorisme dengan cara bervariasi yaitu bisa dengan cara seperti deklarasi negara pengempungan atau darurat militer, pemberlakuan undang-undang anti terorisme dan penguatan kehakiman di suatu sisi, pembentukan bank data terkomputerisasi dan kemampuan intelijen operasi rahasia yang dilakukan dengan baik. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan

wilayah maupun warganya dengan menggunakan politik, militer dan ekonomi dari berbagai ancaman yang ada. Kontra terorisme merupakan suatu langkah yang bisa diambil oleh negara untuk melaksanakan kewajibannya. Kontra terorisme adalah konsep yang membahas mengenai tindakan-tindakan untuk melawan ancaman, mencegah tindakan dan serta mengurangi pengaruh yang diberikan oleh pelaku terorisme. Pada tahun 2005 Uni Eropa mengeluarkan 4 pilar strategi kontra terorisme yaitu pertama strategi Pilar prevent menekankan pada pencegahan terjadinya tindakan terorisme dan mencegah terorisme untuk merekrut anggota baru. Kedua adalah strategi protect yaitu memberikan perlindungan kepada warga dan instrumen negara. Ketiga adalah strategi pursue yang dilakukan saat terjadinya serangan teroris yang dilakukan dengan melakukan penyelidikan, pengejaran dan penangkapan pelaku teroris. Keempat adalah strategi respon yang dilakukan setelah terjadinya serangan teroris yaitu menekankan rekonstruksi suatu negara setelah serangan teroris dengan meningkatkan kapasitas penyelamatan dan menangani kebutuhan korban seperti ketersediaan makanan, kebutuhan obat-obatan dan tenaga medis. Kontra terorisme dikeluarkan dalam bentuk kebijakan. (Sari et al., 2020)

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan wilayah maupun warganya dengan menggunakan politik, militer dan ekonomi dari berbagai ancaman yang ada. Kontra terorisme merupakan suatu langkah yang diambil oleh presiden Duterte dalam menangani masalah terorisme. Langkah kebijakan yang diambil oleh presiden Duterte terdapat didalam 4 pilar strategi kontra terorisme yang dikeluarkan oleh Uni Eropa 2005. Presiden Duterte mengumumkan darurat militer di saat meledaknya konflik Marawi, melakukan operasi militer untuk membebaskan Marawi, melakukan penangkapan pelaku teroris. Kebijakan tersebut merupakan penerapan dari pilar strategi protect yaitu memberikan perlindungan kepada warga dan instrumen negara dan pilar strategi pursue yang dilakukan saat terjadinya serangan teroris yang dilakukan dengan melakukan penyelidikan, pengejaran dan penangkapan pelaku teroris.

Mengenai pilar strategi respon yang dilakukan setelah terjadinya serangan teroris yaitu menekankan rekonstruksi suatu negara setelah serangan teroris dengan meningkatkan kapasitas penyelamatan dan menangani kebutuhan korban seperti ketersediaan makanan, kebutuhan obat-obatan dan tenaga medis, Pemerintah Filipina memberikan bantuan darurat, untuk rekonstruksi dan pemulihan Marawi dengan membentuk Tugas Bangon Marawi pada Juni 2017. Kebijakan lain yang diambil oleh Duterte dalam memberantas terorisme adalah dengan melakukan kontra terorisme melalui hubungan kerja sama dengan negara tetangga seperti

Malaysia dan Indonesia. Kerja sama tersebut meliputi patroli wilayah, pertukaran informasi dan sebagainya. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi prevent Pilar prevent menekankan pada pencegahan terjadinya tindakan terorisme dan mencegah terorisme untuk merekrut anggota baru. Presiden Duterte juga mengeluarkan UU Anti Terorisme 2020 untuk menggantikan Human Security Act 2007 dikarenakan UU tersebut tidak cukup memerangi terorisme di zaman modern ini.

#### **D. Hipotesis**

Penulis mengindikasikan bahwa Rodrigo Duterte mengancam setiap aksi tindakan terorisme dan bersifat keras terhadap pelaku teror. Kebijakan yang diambil dalam mengatasi aksi terorisme adalah:

1. Melakukan Darurat militer yang merupakan bagian pilar protect, operasi militer yang merupakan bagian dari pilar persue dan memberikan bantuan darurat dengan membentuk Tugas Bangon Marawi pada Juni 2017 dalam konflik marawi yang merupakan bagian dari pilar respon.
2. Kerja sama antar negara tetangga seperti Trilateral Maritime Patrol Indomalphi dan patroli trilateral udara yang merupakan bagian dari pilar prevent.
3. Perubahan Human Security Act 2007 menjadi UU Anti Terorisme 2020 yang sejalan dengan konsep kontra terorisme menurut Hoffman dan Morrison Taw.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penulisan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Menyuguhkan data-data mengenai tindakan terorisme sebelum presiden Rodrigo Duterte menjabat sebagai presiden.
2. Menyuguhkan data-data tindakan terorisme selama masa jabatan presiden Rodrigo Duterte
3. Pandangan Duterte terhadap terorisme melalui konsep terorisme.
4. Menganalisis kebijakan Duterte dalam memerangi terorisme melalui kontra terorisme.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini di fokuskan dalam rentang waktu presiden Rodrigo Duterte menjabat sebagai presiden Filipina yaitu selama 2016 hingga 2022.



## **G. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan hakikat hubungan antar variable dalam masalah penelitian yang secara empiris dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan dengan pola yang dihadapi. Menurut Lamont, metode penelitian kualitatif didalam hubungan internasional memiliki tujuan untuk menjelaskan perbedaan dalam sumber-sumber yang didapat maupun alat dalam mengumpulkan data dan analisis baik dalam analisis maupun tertulis. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pemahaman luas dalam mengenai kejadian, fenomena, negara, wilayah dan organisasi atau individu. (Winarto & Sudirman, 2021)

Dalam penelitian ini menggunakan konsep terorisme dan kontra terorisme dalam menganalisis kebijakan yang diambil oleh Duterte dalam memerangi terorisme. Data yang akan disajikan berbentuk kebijakan yang digunakan oleh Duterte untuk memerangi terorisme selama masa jabatannya. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari informasi yang beredar di internet melalui Buku, jurnal, artikel, situs internet yang relevan dengan topik dan sumber data tertulis lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsi untuk mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh Duterte untuk memerangi tindakan terorisme selama masa jabatannya menjadi presiden Filipina.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **Bab 1**

#### **Pendahuluan**

Pada bab ini penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

### **Bab II**

#### **Pembahasan**

##### **A. Tindakan Terorisme di Filipina**

Pada bagian penulis akan membahas dan menyajikan data tindakan terorisme yang terjadi di Filipina sebelum presiden Duterte menjabat dan selama Duterte menjabat sebagai presiden.

##### **B. Pandangan Duterte terhadap terorisme**

Pada bagian ini penulis akan membahas pandangan presiden Duterte terhadap terorisme.

### **C. Kebijakan kontra terorisme Duterte terhadap terorisme**

Pada bagian ini penulis akan membahas kebijakan kontra terorisme selama Dutertemenjabat sebagai presiden untuk memberantas terorisme.

### **Bab III**

#### **Kesimp**

#### **ulan**

Dalam bab ini akan menyajikan kesimpulan yang diambil dari pembahasan bab-bab sebelumnya.